

BAB IV
DIPLOMASI INDONESIA DENGAN NEGARA-NEGARA ASIA
TENGGARA

Kerja sama secara multilateral antara Indonesia dan negara-negara tetangga di kawasan dalam penanggulangan *illegal fishing* perlu dilakukan mengingat kegiatan ilegal ini sudah sangat mengancam keberadaan dan kelestarian sumber daya perikanan Indonesia. Setidaknya, ada empat negara tetangga yang perlu diperhatikan Indonesia dalam penanggulangan illegal fishing secara multilateral. Keempat negara tetangga tersebut adalah Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia dikarenakan para nelayannya sering memasuki dan menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Kapal asing yang melakukan kegiatan illegal fishing di perairan Indonesia sebagian besar berasal dari keempat negara tetangga tersebut, meskipun ada juga dari beberapa negara lain. Oleh karena itu, disini penulis akan membahas mengenai diplomasi Indonesia dengan Negara-negara Asia Tenggara yaitu dengan menghadiri pertemuan dan konferensi *ASEAN Maritim Forum (AMF)* guna menanggulangi kasus Illegal Fishing tersebut.

Kepentingan nasional negara Indonesia sesuai dengan ketentuan nasional dan hukum internasional. Pemerintah merancang 6 (enam) program utama dalam melaksanakan strategi kebijakan diplomasi multilateral dengan negara maritime lainnya. Pertama, peningkatan kepemimpinan di dalam berbagai kerja sama di bidang kelautan pada tingkat bilateral, regional, dan multilateral. Kedua,

peningkatan peran aktif dalam upaya menciptakan dan menjaga perdamaian dan keamanan dunia melalui bidang kelautan. Ketiga, kepemimpinan atau peran aktif dalam penyusunan berbagai norma internasional bidang kelautan. Keempat, percepatan penyelesaian penetapan batas maritim Indonesia dengan negara tetangga. Kelima, percepatan penetapan ekstensi landas kontinen sesuai dengan hukum internasional. Keenam, peningkatan penempatan WNI di dalam berbagai organisasi internasional bidang kelautan.

Indonesia saat ini tengah melihat *ASEAN Maritime Forum* sebagai cara untuk membawa kasus illegal fishing ke tingkat regional. Pada pertemuan *ASEAN Maritime Forum* (AMF) ke-2 di Pattaya, Thailand yang diselenggarakan pada 17-19 Agustus 2011, para Pemimpin *ASEAN* berusaha memperluas jangkauan AMF dan mengajak negara-negara di kawasan Asia Timur. *ASEAN* juga mempertahankan sentralitas penuh *ASEAN* dalam proposal dan inisiatif baru terkait dengan kerjasama maritim di kawasan dan sekitarnya

Sehubungan dengan hal tersebut *ASEAN* berencana menjadikan AMF untuk mulai mengembangkan pendekatan dan langkah-langkah kooperatif untuk kerjasama maritim lebih lanjut. Untuk tujuan tersebut, para Pemimpin *ASEAN* berkomitmen untuk menciptakan mindset kerjasama maritim yang efektif pada isu-isu terkait serta memberikan rekomendasi dan solusi terhadap berbagai tantangan yang muncul saat ini. *ASEAN Maritime Forum* (AMF) merupakan inisiatif untuk melakukan kerjasama dalam berbagi informasi antar negara anggota *ASEAN* dan juga mengakui pentingnya promosi dan harmonisasi dalam kerjasama perlindungan lingkungan maritim, termasuk kegiatan ilegal yang

berkaitan dengan lingkungan maritim. AMF mengupayakan peningkatan kerjasama yang berkelanjutan dalam memerangi pembajakan dan perampokan bersenjata di laut, memberantas *illegal logging*, penyelundupan barang dan manusia migran, perdagangan gelap obat-obatan dan semua kejahatan maritim.⁵⁹

A. Gambaran Umum Asean Maritim Forum (Amf)

Asean Maritime Forum adalah Forum dialog dari institusi terkait dengan masalah Kelautan/ Maritim. Pembentukan AMF tertuang dalam APSC (ASEAN Political- Security Comunit) Blueprint (2009-2015) yaitu dalam butir A.2.5 Mempromosikan Kerja Sama Maritim ASEAN yaitu: dengan membentuk ASEAN Maritime Forum (AMF); Menerapkan pendekatan komprehensif yang menekankan pada Keselamatan navigasi dan keamanan regional yang menjadi kepentingan bersama bagi komunitas ASEAN; Mengumpulkan isu-isu maritim dan mengidentifikasi kerja sama maritim diantara Negara-negara Anggota ASEAN; Mempromosikan kerja sama dalam SAR maritim melalui kegiatan-kegiatan, meliputi pertukaran informasi, kerja sama teknologi dan pertukaran antar pejabat terkait.

Mengingat AMF merupakan forum dibidang kelautan yang baru dibentuk, maka pembentukan AMF didasarkan atas prinsip-prinsip dimana AMF tidak akan mengalami tumpang tindih dengan mekanisme sektoral yang sudah ada di

⁵⁹ Tabloid Diplomasi. Edisi Desember 2011. Kerjasama Maritim ASEAN. Diakses dari <http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/162-desember-2011/1289-kerjasama-maritim-asean.html> pada 20 Mei 2017

ASEAN, serta AMF akan membahas isu lintas sektoral terkait maritim dan memberikan rekomendasi kepada sektoral terkait.

Pembentukan AMF dipandang perlu keberadaanya dengan berbagai alasan yaitu dimana Laut dan perairan di Asia Tenggara serta Laut Cina Selatan memiliki arti penting bagi Perekonomian, Perdagangan, Transportasi, Komunikasi seluruh negara ASEAN dan kekuatan maritim global, serta Kawasan Asia Tenggara menyimpan potensi konflik yang berkaitan dengan masalah maritime dan juga Isu maritim ditangani oleh berbagai ASEAN sectoral bodies, sesuai fokus dan kewenangannya sehingga perlu koordinasi dan sinergi yang komprehensif. Maka berdasarkan hal itu tentu akan memberikan keseriusan antar negara untuk lebih peduli terhadap maritim di wilayah Asia Tenggara.

ASEAN menghormati prinsip-prinsip kesetaraan kedaulatan, integritas teritorial, dan kemerdekaan. Mengakui bahwa komunitas dan organisasi internasional seperti IMO dan negara-negara yang tergabung didalamnya, memiliki peran dalam menangani ancaman dan tantangan maritim. Dalam hal ini ASEAN melakukan pendekatan yang terpadu dan komprehensif mencakup semua tantangan dan ancaman maritim terkait. Memberikan rekomendasi mekanisme kerjasama maritim yang relevan dalam kerangka ASEAN untuk dipertimbangkan oleh masing-masing anggota. AMF akan melakukan konferensi/seminar tentang kelautan terkait dengan isu-isu yang berkembang dan berpotensi mempengaruhi ASEAN.

ASEAN saat ini diarahkan kepada common platform dan bukan pada common position. Oleh sebab itu, dalam pertemuan tersebut telah disetujui tiga

rekomendasi utama yang dipandang penting bagi kepentingan bersama dan yang realistis untuk segera diimplementasikan sebagai kerangka kerja AMF. Ketiga rekomendasi tersebut adalah Connectivity, Understanding Maritime Security dan Search and Rescue to Assist Persons at Distress at Sea.

Melihat situasi dan keadaan yang melanda kawasan Asia Tenggara mengenai ancaman pembajakan atau perompakan di wilayah laut, peran ASEAN sangat diperlukan sebagai wadah yang menengahi negara-negara anggota ASEAN untuk membicarakan masalah-masalah menyangkut tentang pembajakan di wilayah perairan negara mereka masing-masing dan juga di perairan sekitar Asia Tenggara. Berkurangnya jaminan keamanan negara-negara besar di kawasan telah mendorong negara-negara ASEAN untuk meningkatkan pertahanannya masing-masing. Peningkatan kemampuan pembelanjaan alat maritim demi pertahanan masing-masing negara ASEAN, apabila tetap dalam kerangka kerjasama regional, tentu akan mempunyai pengaruh yang positif bagi pertahanan regional secara keseluruhan. Akan tetapi jika masing-masing negara anggota ASEAN meningkatkan sistem pertahanan secara sendiri-sendiri, maka ditakutkan akan memicu adanya perlombaan senjata. Hal ini jelas sangat mengancam stabilitas dan kondisi keamanan regional pada masa-masa mendatang.

Keamanan maritim telah dipandang sebagai salah satu elemen penting dalam gagasan ASEAN Security Community. Dalam kerangka itu pula kemudian organisasi regional ini menciptakan mekanisme ASEAN Maritime Forum (AMF). Namun, menurut Informal Consultative Process (ICP) oleh PBB, tidak terdapat definisi tentang apa yang dimaksud dengan keamanan maritim. Hanya disebutkan

bahwa Forum Maritim ASEAN dirancang sebagai forum untuk membahas langkah untuk memberikan respons terhadap ancaman-ancaman keamanan maritim. Ancaman keamanan maritim yang disebut itu adalah (1) pembajakan, (2) perampokan bersenjata, (3) lingkungan kelautan, (4) penangkapan ikan yang ilegal, dan (5) penyeludupan barang, manusia, senjata dan obat-obatan.⁶⁰ Forum Maritim ASEAN merupakan forum yang dibentuk oleh ASEAN, pembentukan AMF dirancang pada saat ASEAN Summit ke-14 di Cha-am Hua Hin, Vietnam, 1 Maret 2009, kemudian mengadopsi blueprint Komunitas Politik-Kelompok ASEAN yang mengacu pada pembentukan ASEAN Maritime Forum.

Kompleksitas isu-isu maritim di kawasan Asia Tenggara memerlukan upaya bersama negara-negara anggota ASEAN untuk mengatasi konflik dan berbagai permasalahan yang sangat potensial, karena dalam kenyataannya bahwa Asia Tenggara merupakan jalur laut internasional dan rute perdagangan yang vital. Untuk itu sebagai tindak lanjut dari upaya negara-negara anggota ASEAN yaitu upaya ASEAN dalam menerapkan Deklarasi ASEAN Concord II (Bali Concord II) yang ditandatangani di Bali, 7 Oktober 2003, menegaskan bahwa isu maritim dan semua yang terkait dengannya adalah isu yang bersifat lintas batas, karenanya harus dibahas dalam forum regional melalui suatu pendekatan yang menyeluruh dan integral. Lebih jauh, pembentukan ASEAN Maritime Forum (AMF) adalah salah satu tindakan penting yang harus dilakukan sesuai Cetak Biru Komunitas Politik-Kelompok.⁶¹

⁶⁰ Dr. Makmur Keliat, *"Keamanan Maritim dan Implikasi Kebijakannya Bagi Indonesia"*, (Jakarta: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2009) Vol 13 No 1.

⁶¹ <http://www.deplu.go.id/Pages/PressRelease.aspx?IDP=972&l=id> diakses pada 10 Mei 2017

AMF merupakan forum dialog instansi-instansi yang terkait dengan isu-isu maritim dalam kerangka ASEAN dan ASEAN Regional Forum (ARF). Pembentukan ASEAN Maritime Forum (AMF) yang merupakan komitmen politik bersama seluruh negara anggota ASEAN, dimaksudkan sebagai wahana untuk membicarakan segala sesuatu yang menyangkut masalah maritim untuk kepentingan bersama. Prinsip AMF adalah berkontribusi pada diskusi tentang isu-isu yang berhubungan dengan maritim yang dijalankan oleh badan-badan ASEAN. Keamanan dan keselamatan pelabuhan-pelabuhan serta jalur-jalur perhubungan laut di perairan Asia Tenggara harus terjamin, oleh sebab itu negara-negara anggota bersama-sama bertanggung jawab untuk mengerahkan kekuatan maritimnya untuk melaksanakan tugas itu. Melalui Forum Maritim ASEAN ini mungkin dapat menyatukan pendapat, pikiran, dan tujuan untuk mengerahkan tugas serta tanggungjawab masing-masing negara dalam meminimalisir masalah maritim tersebut. Penciptaan keamanan regional merupakan salah satu tujuan utama dari ASEAN dalam menunjang interaksi kerjasama antarnegara anggota di ASEAN yang secara luas mencakup keamanan bersama, dari ancaman tradisional menuju non-tradisional. AMF sendiri adalah merupakan komunitas yang dibentuk oleh negara-negara di Asia Tenggara untuk membahas masalah keamanan wilayah laut.

Peran dari ASEAN Maritime Forum dalam kawasan maritim adalah untuk menciptakan kawasan yang aman dan terkendali mengingat frekuensi ancaman non-tradisional (kejahatan dan perdagangan terorganisir, pembajakan, perdagangan obat-obatan, penyelundupan dan perdagangan manusia, keamanan

lingkungan, dan terorisme) yang tidak lagi bersifat internal tetapi lebih kepada eksternal memberikan tanda bahwa AMF dapat memberikan solusi yang tepat dan damai dengan konsep cooperative security (kerjasama keamanan) yang dibangun. Kerjasama pertahanan bersama dalam pengawasan perbatasan ini dapat menjadikan hubungan yang harmonis bagi setiap negara ataupun bilateral. Misalnya kerjasama perairan patroli bersama di daerah perairan selat yang sering terjadi, penyelundupan senjata, penangkapan ikan ilegal, perusakan laut secara ilegal dan pengamanan sumber daya kelautan. Faktor tersebut dapat dikatakan keamanan maritim sangat penting dan vital, untuk dijaga, dengan arti bahwa keamanan regional perlu ditingkatkan secara bersama-sama. Seperti contoh pada Selat Malaka sebagai jalur utama pelayaran perdagangan internasional yang berpotensi tindak kejahatan transnasional, pembajakan, dan penyelundupan, yang mana di selat malaka tidak mempunyai pengamanan khusus dari negara yang bersangkutan. Dan dari contoh persolan yang dihadapi tersebut menjadi tantangan nyata bagi ASEAN dalam pembentukan AMF karena Asia Tenggara dengan wilayah perairan yang besar dan strategis akan memberi pengaruh serius bagi kelangsungan ekonomi masing-masing negara.⁶²

Inti dari peran ASEAN Maritime Forum (AMF) disini adalah membentuk opini kesadaran negara di Asia Tenggara untuk bekerjasama dalam pengamanan wilayah perairan laut, yang menjadi titik startegis pelayaran international. Serta AMF mampu menciptakan keamanan regional, dimanapun wilayah negara berbatas dengan laut tanpa mengurangi kedaulatan masing-masing. AMF yang merupakan

⁶² <http://labhi.staff.umm.ac.id/2011/05/12/peran-asean-maritime-forum-amf-dalam-keamanan-perairan-di-asia-tenggara/> diakses pada 10 Mei 2017

konsep dari APSC (*Asean Security Political Community*), dari blueprint tersebut menjadi landasan pembentukan AMF tersebut, dimana salah satu isinya adalah adanya kerjasama dalam penanganan wilayah maritim di ASEAN. Dari konsep yang dibentuk AMF dalam blueprint APSC, konsep cooperative security dipakai untuk menangani permasalahan maritim yang kesemua negara memiliki permasalahan yang sama, oleh sebab itu keamanan maritim di ASEAN membutuhkan kesadaran keamanan bersama untuk menjaga instabilitas kawasan.

Peran AMF yang memberikan konsep hubungan kerjasama di wilayah perairan untuk mengurangi dan memberikan solusi terhadap masalah yang tengah dihadapi. Kekuatan maritim yang dimiliki oleh masing-masing negara dituntut untuk melaksanakan tugas keamanan dan keselamatan di laut sampai diluar wilayah yurisdiksi (perairan kawasan Asia Tenggara) yang mengikat semua negara maritim di Asia Tenggara hendaknya menjadi pegangan utama. Peran atau fungsi dari AMF belum sepenuhnya terealisasikan dengan baik karena yang dirasakan masih kurang saat ini adalah kerjasama antar negara-negara anggota ASEAN dalam melaksanakan kegiatan kerjasama. Oleh karena itu, fungsi AMF yang diharapkan dapat menangani permasalahan regional yang kian marak di era global ini, dapat dikatakan masih belum memaksimalkan fungsi serta perannya sebagai tempat atau forum untuk membicarakan masalah-masalah mengenai keamanan maritim di kawasan Asia Tenggara. Dalam menjalankan perannya, ASEAN Maritime Forum membahas serangkaian masalah terkait bidang maritim seperti konektivitas maritim, dimana dalam hal ini diharapkan adanya pendiskusian dan pengidentifikasian kerjasama maritim yang dapat memberikan

kontribusi bagi upaya peningkatan integrasi kawasan dalam Komunitas ASEAN serta memupuk rasa kebersamaan dalam hubungan budaya dan sejarah.⁶³

B. Pertemuan/Konferensi ASEAN Maritime Forum (AMF)

Sejalan dengan perkembangan di bidang ekonomi dan teknologi informasi dan komunikasi ancaman keamanan terhadap zona maritim Asia Tenggara akan terus ada. Seperti diketahui bahwa kawasan Asia Tenggara lebih dibatasi oleh wilayah perairan dan batas negaranya pun masih saling tumpang tindih dengan negara lain. Hal ini menyebabkan tidak adanya komunikasi yang intens terhadap permasalahan yang sebenarnya sudah tidak lagi harus diselesaikan sendiri tetapi harus bersifat kebersamaan mengingat konteks ancaman transnasional meluas tidak hanya akan merugikan sendiri tetapi juga dapat merugikan ke-Negara lain.

ASEAN sebagai organisasi regional harus mengantisipasi kemungkinan bahwa pembajakan bisa menjadi lebih ganas, sarana maritim semakin dimanfaatkan oleh penjahat dan teroris sehingga ancaman terhadap pengiriman meningkat. Dalam konteks tertentu, prosedur dan tindakan pencegahan, penangkalan, penolakan, deteksi, penampungan, atau respons akan berfungsi untuk mengurangi ancaman keamanan pada tingkat yang memadai.

Daftar permasalahan yang umum terjadi terkait dengan masalah keamanan maritim dan harus ditangani melalui kerjasama keamanan maritim ASEAN yang efektif seperti isu-isu maritim yang berkaitan dengan kejahatan transnasional, seperti perdagangan manusia, penyelundupan, *illegal fishing*, *illegal logging*,

⁶³ <http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-issuue/104-agustus-2010/903-asean-maritime-forum-akan-dapat-mengatasi-berbagai-isu-terkait-wilayah-maritim.html> diakses pada 10 Mei 2017

perampokan bersenjata dan pembajakan dan lain-lainnya. Maka dari itulah, pembentukan kesadaran saling percaya sangat dibutuhkan agar tidak ada kecurigaan dalam kerjasama karena keamanan maritim di Asia Tenggara sangat rawan dan tinggi. ASEAN sebagai komunitas regional yang menjadi wadah bagi setiap anggotanya menjadi penting untuk meluaskan cakupan yang dapat mengontrol keamanan wilayah maritim.

Pada Konferensi Koordinasi Rencana Aksi Komunitas Keamanan ASEAN (*ASEAN Security Community Plan of Action Coordinating Conference*) di Sekretariat ASEAN (2006), Indonesia mengusulkan untuk menyelenggarakan Workshop tentang pembentukan AMF. Pada KTT ke-14 di Cha-am Hua Hin, Vietnam pada 1 Maret 2009, Indonesia mengajukan konsep mengenai pembentukan AMF, kemudian menjadi salah satu poin dalam cetak-biru Komunitas Politik-Kelompok Keamanan ASEAN yang disepakati pada dokumen *Road Map for an Asean Community 2009-2015*. Kemudian pada tanggal 28-29 Juli 2010 di Surabaya, forum tersebut secara resmi dibuka oleh Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Pertemuan ini membahas beberapa poin, yaitu 1) masalah keamanan maritim perlu ditangani, 2) menjajaki kerjasama operasional yang dapat dikembangkan secara konkrit dan 3) mengidentifikasi kerjasama di masa depan.

Pembentukan AMF tersebut sangat penting karena dapat memberikan kontribusi bagi pembinaan pembentukan Komunitas ASEAN pada 2015. Dimana dalam pembentukan AMF melibatkan seluruh negara-negara anggotanya ASEAN (Kamboja, Singapura, Myanmar, Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam, Filipina,

Indonesia, Malaysia, dan Laos) karena sebagian besar memiliki perbatasan maritim, dan hampir 80% dari wilayah ini terdiri dari dominan laut.

Pembentukan *ASEAN Maritime Forum* (AMF) adalah salah satu tindakan penting yang harus dilakukan sesuai blueprint Komunitas Politik-Keamanan. Untuk itu ASEAN merumuskan untuk membentuk sebuah komunitas yang menangani permasalahan keamanan terutama keamanan maritime, yaitu terwujud dengan hadirnya *ASEAN Maritime Forum* (AMF)⁶⁴. Komunitas keamanan ASEAN ini dimaksudkan untuk menciptakan perdamaian, Stabilitas kawasan demokratis dan sejahtera untuk mendukung keharmonisan hubungan satu sama lain. Maka dibentuk *ASEAN Maritime Forum* (AMF) yang bertujuan sebagai komunikasi konflik di wilayah maritime dan penanggulangan permasalahan keamanan wilayah maritime seperti terorisme, trafiking, drug, perdagangan senjata dan perompakan.

Sedangkan prinsip AMF itu sendiri adalah berkontribusi pada diskusi tentang isu-isu yang berhubungan dengan maritim yang dijalankan oleh badan-badan ASEAN yang ada tanpa duplikasi terhadap mekanisme tersebut. Dalam hal ini, formulasi kebijakan dan keputusan pada semua permasalahan yang berada dalam lingkup badan sektoral ASEAN yang sudah ada, akan tetapi tetap berada di bawah badan sektoral masing-masing.

Mengikuti praktek ASEAN yang ada, semua anggota ASEAN Member States (AMSs) harus bergiliran memimpin pertemuan tahunan AMF sesuai hosting secara sukarela atau pada interval yang disetujui oleh anggota ASEAN

⁶⁴ www.aseansec.org diakses 10 Mei 2017

Member States (AMSs). Forum juga dapat diadakan dan diselenggarakan di Sekretariat ASEAN, jika tidak ada satu pun anggota ASEAN Member States (AMSs) yang menawarkan diri menjadi tuan rumah pertemuan. AMF juga bisa diadakan sebelum Pertemuan Inter-sesi Keamanan Laut Forum Regional ASEAN (ARF). Sekretariat ASEAN akan membantu Ketua AMF dengan memberikan dukungan teknis dan kesekretariatan, serta bertindak sebagai repositori dokumen AMF.

CPR dapat ditunjuk untuk membantu dalam persiapan pembentukan Forum dan membantu mengamankan dukungan dana dan melaksanakan pekerjaan Forum sehari-hari. Setiap Anggota ASEAN akan menunjuk perwakilannya untuk melayani dan fokus di AMF serta mengidentifikasi narasumber mengenai isu-isu yang terkait dengan agenda AMF. Agenda pertemuan disusun oleh Negara Anggota ASEAN yang menjabat sebagai Ketua dengan bantuan dari Sekretariat ASEAN dan kemudian disebarluaskan kepada AMSs untuk mendapatkan komentar dan masukan yang harus sudah diterima satu bulan sebelum jadwal pertemuan.

Tuan rumah AMF ASEAN akan menanggung biaya organisasi penyelenggaraan pertemuan, sementara delegasi akan menanggung biaya perjalanan dan akomodasi. Sekretariat ASEAN dapat memperoleh dana dari berbagai sumber untuk membiayai pertemuan ini, tetapi semua AMSs harus memastikan bahwa Forum ini tidak di drive oleh donor. Perkembangan konsep AMF ini dicatat dalam Pertemuan Menteri Transportasi ASEAN (ASEAN Transports Ministers' Meeting/ATM), Pertemuan Menteri ASEAN Mengenai

Kejahatan Transnasional (ASEAN Ministers' Meeting on Transnational Crime/AMMTC), Pertemuan Menteri Lingkungan Hidup ASEAN (ASEAN Ministerial Meeting on Environment/AMME), Pertemuan Menteri Hukum ASEAN (ASEAN Law Ministers' Meeting/ALAWMM) dan Pertemuan Menteri ASEAN (ASEAN Ministers Meeting/AMM).

Dari terbentuknya AMF ini diharapkan dapat menangani permasalahan regional yang kian marak di era global ini, gerakan separatism dan terrorist yang setiap saat mengancam Negara dan stabilitas regional ASEAN. Ada beberapa aspek terpenting di ASEAN maritime forum yaitu salah satunya merapatkan pintu di sektor perairan (maritime) karena ancaman transnasional banyak menggunakan fasilitas laut untuk bergerak. Inti dari peran AMF disini adalah membentuk opini kesadaran negara di Asia tenggara untuk bekerjasama dalam pengamanan wilayah perairan laut, yang menjadi titik startegis pelayaran international. serta AMF mampu menciptakan keamanan regional, dimanapun wilayah negara berbatasan dengan laut tanpa mengurangi kedaulatan masing-masing. Pembentukan opini ini membentuk sebuah forum untuk maritime yaitu AMF (*Asean maritime forum*) yang merupakan konsep dari APSC (*Asean Security Political Community*) , dari blueprint tersebut menjadi landasan pembentukan AMF tersebut. Dimana salah satu isinya adalah adanya kerjasama dalam penanganan wilayah maritime di ASEAN.

C. Kesepakatan AMF (ASEAN Maritime Forum)

AMF merupakan forum dialog instansi-instansi yang terkait dengan isu-isu maritime. Hingga saat ini, AMF telah dilaksanakan 6 (enam) kali. Sebagai pemrakarsa utama terbentuknya forum tersebut, Indonesia telah menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan inauguras AMF yang pertama pada tahun 2010 di Surabaya dan AMF ke-6 pada Oktober 2015 di Manado. Thailand bersedia menjadi tuan rumah Pertemuan AMF ke-2 di Pattaya pada tahun 2011 dan Filipina pada Pertemuan AMF ke-3 di Manila pada tahun 2012. Pertemuan AMF ke-4 telah dilaksanakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada Oktober 2013, sedangkan Pertemuan AMF ke-5 telah dilaksanakan di Da Nang, Vietnam pada Agustus 2014.

1. Tahun 2010

Dalam kerangka ASEAN yang menggelar pertemuan pertamanya di Surabaya pada 28-29 Juli 2010. Indonesia menganggap ASEAN sebagai corner stone politik luar negeri untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman dan tantangan guna menciptakan perdamaian dan stabilitas kawasan demokratis dan sejahtera untuk mendukung keharmonisan hubungan satu sama lain. Pertemuan perdana AMF dibuka oleh Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan dipimpin oleh Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kemlu RI. AMF dihadiri oleh para pejabat senior (ASEAN SOM), perwakilan dari CPR, pejabat senior Badan-badan Sektoral ASEAN (Senior Officials of ASEAN Sectoral Bodies) terkait dengan isu maritim serta Sekretariat ASEAN. Pakar-pakar isu keamanan

dan maritim juga hadir pada forum tersebut, di antaranya Dr. So Umezaki dari *Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA)*, Bantarto Bandoro dari Universitas Indonesia, dan Robert C. Beckman dari *Center for International Law, National University of Singapore*. Selain menampilkan perspektif para ahli pada masing-masing tema, beberapa negara ASEAN juga diminta memberikan paparan/tanggapan terkait dengan isu yang disampaikan, disamping tanggapan umum dari para peserta pertemuan. Pada pertemuan tersebut juga dibahas mengenai *Identifying Future Work of the ASEAN Maritime Forum*.⁶⁵

Adapun Pertemuan AMF ke depan membahas isu-isu terkait dengan tiga bidang kerjasama yang akan dilaksanakan yaitu konektivitas ASEAN (ASEAN Connectivity), memahami tentang keamanan maritim (understanding maritime security problems in the region), serta penanganan SAR (search and rescue to assist persons and vessels in distress at sea). Bidang kerjasama yang digarap AMF merupakan isu sengketa maritim.

2. Tahun 2011

Pada pertemuan kedua yang diselenggarakan pada 17-19 Agustus 2011 di Pattaya, Thailand. Para Pemimpin ASEAN menegaskan kembali komitmen untuk bekerjasama dalam menangani isu-isu maritim secara komprehensif dalam kerangka ASEAN Maritim Forum (AMF) dan mekanisme ASEAN lainnya untuk kepentingan di kawasan ASEAN. AMF telah membahas isu-isu penting, kesadaran mengenai domain maritim, kebebasan bernavigasi, perompakan di laut,

⁶⁵www.deplu.go.id, diakses 26 juli 2017

lingkungan laut, pariwisata laut, perikanan, serta bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana.

3. Tahun 2012

Dan pertemuan ketiga ini menjadi lebih penting karena sekaligus akan digelar bersamaan dengan Expanded AMF yang digagas oleh Jepang dan disetujui oleh Indonesia sebagai negara terkemuka di organisasi kawasan ini. Expanded ASEAN Maritime Forum (EAMF) diadakan di Manila, Filipina pada 5 Oktober 2012. Pertemuan ini dipimpin oleh Erlinda Basilio F., Wakil Kebijakan Departemen Luar Negeri dan Pertemuan ASEAN Senior Officials 'Meeting (SOM) Pemimpin Filipina. Acara ini dihadiri oleh pemerintah dan non-pemerintah delegasi dari East Asia Summit (EAS) negara-negara peserta, yaitu: sepuluh negara anggota ASEAN, Australia, China, India, Jepang, Selandia Baru, Republik Korea, Federasi Rusia dan Amerika Serikat Amerika, dan Sekretariat ASEAN. EAMF diadakan sebagai tanggapan terhadap pernyataan para pemimpin ASEAN, serta pemimpin KTT Asia Timur (EAS) di Bali, Indonesia pada November 2011, yang mendorong "dialog yang melibatkan EAS negara-negara peserta untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan umum tentang isu-isu maritim bangunan atas yang ada *ASEAN Maritime Forum* (AMF), "dimana mereka juga" positif mencatat usulan mengadakan sebuah AMF diperluas, back-to-back dengan pertemuan masa depan AMF , untuk memasukkan negara-negara di kawasan Asia Timur yang lebih luas.

4. Tahun 2013 - 2015

Pada tahun 2013 - 2015, Indonesia juga telah memprakarsai disepakatinya EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation yang mencakup 5 pilar kerja sama maritim di Kawasan. Dalam kerja sama tersebut, pemberantasan dan pencegahan Illegal, Unreported dan Unregulated (IUU) Fishing menjadi bagian penting yang berhasil disepakati.

Kerja sama terkait Illegal, Unreported dan Unregulated (IUU) Fishing dibahas dalam konteks penanganan isu-isu lintas batas (*transboundary challenges*), lingkungan laut (*marine environment*), serta kerja sama pencegahan produksi hasil-hasil perikanan jika dihasilkan dari aktifitas *Illegal, Unreported dan Unregulated (IUU) Fishing*. Pada saat menjadi tuan rumah Pertemuan *ASEAN Maritime Forum ke-6 dan Expanded ASEAN Maritime Forum (EAMF) ke-4* di Manado, September 2015, Indonesia secara khusus mengangkat pentingnya penanggulangan isu *Illegal, Unreported dan Unregulated (IUU) Fishing*. Pada pertemuan ini, Indonesia kembali mengusulkan dibentuknya pengaturan regional penanggulangan IUUF dan mengajak negara-negara di Kawasan untuk mendukung inisiatif ini.

Meskipun dalam *Concept Paper AMF* disebutkan bahwa agenda pembahasan ditentukan oleh Negara Ketua ASEAN, namun pada prakteknya, agenda AMF diusulkan oleh negara tuan rumah dengan meminta masukan dari negara-negara anggota lainnya. Tidak mengherankan jika dalam beberapa pertemuan AMF, kepentingan tuan rumah terefleksikan dalam agenda pertemuan. Misalnya pada AMF ke-6, Pertemuan membahas isu *Illegal, Unreported, and*

Unregulated Fishing (IUU Fishing) yang diusung Indonesia. Pertemuan AMF ke-3 dan ke-5 di Manila dan Da Nang secara ekstensif membahas Laut China Selatan yang menjadi perhatian utama Filipina dan Vietnam.

Selayaknya sebuah forum dialog, AMF beberapa kali juga dipakai untuk *testing the water* isu-isu yang menjadi perhatian bersama di kawasan, baik untuk mengetahui posisi negara-negara anggota ASEAN atau untuk membentuk suatu wacana. Sebagai contoh, pada AMF ke-5 di Vietnam, Filipina mengusulkan dibentuknya *ASEAN Coast Guard Forum (ACGF)*. Pada AMF ke-6, Indonesia mengusulkan dibentuknya instrumen yang mengikat dalam upaya menangani *Illegal, Unreported dan Unregulated (IUU) Fishing* di kawasan. Dari sini, teridentifikasi bahwa tidak semua negara anggota ASEAN dapat mendukung ide pembentukan instrumen tersebut. Indonesia selanjutnya memutuskan untuk membentuk instrumen mengikat mengenai *Illegal, Unreported dan Unregulated (IUU) Fishing* di luar mekanisme ASEAN.

Sebagai negara kepulauan yang memiliki potensi laut terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memandang penting isu ini. Indonesia merupakan salah satu promotor pemajuan pembahasan dan kerja sama maritim di kawasan melalui berbagai mekanisme kerja sama di ASEAN, termasuk melalui ASEAN Maritime Forum (AMF) dan *Expanded ASEAN Maritime Forum (EAMF)*.

Di dalam mekanisme ASEAN terdapat ASEAN Maritime Forum (AMF) yang membahas isu kerjasama dibidang maritim diantara Negara anggota ASEAN. Setelah diberlakukannya AMF, besarnya ketertarikan pihak eksternal untuk ikut pula terlibat dalam pembahasan isu maritim di AMF dan menjadikan

Expanded ASEAN Maritime Forum (EAMF) terbentuk 2 tahun kemudian. EAMF adalah ASEAN-led Mechanism yang merupakan perluasan dari AMF, namun dalam level pemerintah dan non pemerintah yang anggotanya berasal dari 18 negara beserta *East Asia Summit* (EAS). Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan keenam AMF dan keempat EAMF di Manado, Sulawesi Utara. Dengan diawali diperluas Expanded ASEAN Maritime Forum (EAMF) rencananya akan meningkatkan kerjasama EAS tidak hanya dalam arti geografis, tetapi juga dalam partisipasi pemangku kepentingan yang relevan, seperti organisasi internasional, lembaga pelatihan maritim, pemilik kapal, para akademisi, dan masyarakat sipil. Dan menekankan bahwa penguatan keamanan maritim dan kerjasama melalui Maritime Forum dan Forum Maritim Expanded ASEAN dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya pembangunan masyarakat ASEAN dengan mempromosikan ASEAN yang damai, lebih terintegrasi dan sejahtera dalam stabil, beragam dan dinamis Asia Timur.

Duta Besar Kan Pharidh, Wakil Tetap ASEAN ke Kamboja dan Ketua Komite Wakil Tetap untuk ASEAN, menekankan pentingnya Phnom Penh Deklarasi ASEAN: Satu Komunitas, Satu Takdir, di mana para pemimpin ASEAN menegaskan kembali komitmen mereka di KTT ASEAN ke-20 di Phnom Penh pada bulan April 2012 untuk meningkatkan dan memperluas kerjasama maritim ASEAN dan upaya kolaboratif bersama di bidang terkait kelautan. Sedangkan, Mulia Koji Tsuruoka, Wakil Menteri Luar Negeri Jepang, menjabat sebagai keynote speaker. Menekankan pentingnya kerjasama internasional dan ketertiban di laut di bawah 1982 Konvensi PBB tentang Hukum Laut kerangka

(UNCLOS), kebutuhan untuk menciptakan ketertiban maritim tergantung pada karakteristik masing-masing daerah sesuai dengan hukum internasional yang relevan , termasuk UNCLOS, pentingnya mengidentifikasi daerah nyata dari kerjasama tentang isu-isu maritim antara negara-negara anggota EAS, dan pentingnya sentralitas dan integritas ASEAN dalam menangani isu-isu maritim di kawasan Asia-Pasifik.

Para delegasi menyambut positif pertemuan perdana dari *Expanded ASEAN Maritime Forum* (EAMF) sebagai jalan untuk Jalur 1,5 diplomasi mengenai isu- isu maritim lintas sektoral yang menjadi perhatian bersama negara-negara peserta EAS. Mereka menekankan pentingnya sentralitas ASEAN, dalam kemitraan dengan peserta proses diperluas EAS lainnya, dalam *ASEAN Maritime Forum*.

Dalam diskusi EAMF difokuskan pada hal berikut: relevansi dari 1982 Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) dalam konteks saat ini, konektivitas maritim dan pengembangan kapasitas, infrastruktur dan peningkatan peralatan, pelaut pelatihan, perlindungan lingkungan laut, mempromosikan ekowisata dan perikanan rezim di Asia Timur, dan mengidentifikasi praktek-praktek terbaik kerjasama.

Dalam melindungi lingkungan laut, delegasi membahas berbagai perspektif dan praktik terbaik tentang kerjasama untuk perlindungan sumber daya laut di wilayah ini. Kedua forum tersebut berhasil menjadi wadah bagi Indonesia untuk mengangkat pentingnya penanggulangan isu *Illegal, Unregulated, and*

Unreported (IUU) Fishing; mengusulkan pengembangan, pengaturan, regional, penanggulangan *IUU Fishing*, dan menggalang dukungan mengenai isu tersebut.

Dari ke-enam pertemuannya, AMF telah membahas isu-isu penting, diantaranya konektivitas maritim, Pencarian dan Bantuan (SAR), Sea Lines of Communication, kesadaran mengenai domain maritim, kebebasan bernavigasi, perompakan di laut, lingkungan laut, pariwisata laut, perikanan, serta bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana.

Dari isu-isu tersebut, AMF telah menghasilkan berbagai rekomendasi penting dalam upaya memajukan kerja sama maritim di ASEAN, seperti melakukan stocktaking kerja sama maritim di kawasan; peningkatan konektivitas maritim; penanggulangan berbagai ancaman maritim baik tradisional maupun non-tradisional, seperti perompakan, perampokan kapal, perdagangan orang, dan terorisme; peningkatan sharing information and intelligence; peningkatan koordinasi yang efektif dengan badan sektoral ASEAN; pembahasan isu lingkungan laut dan penanganan *Illegal, Unreported dan Unregulated (IUU) Fishing*.

Tabel 4.1 Jumlah Kasus Penangkapan Ikan Ilegal (*Illegal Fishing*) oleh Kapal Asing di Indonesia

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2010	183 kasus
2	2011	104 kasus
3	2012	75 kasus
4	2013	58 kasus
5	2014	46 kasus
6	2015	21 kasus
7	2016	28 kasus

Sumber : <http://www.tempo.co/read/news/2014/01/08/092543036>

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa terjadi pencurian ikan rata-rata oleh 100 kapal asing setiap tahunnya yaitu dari tahun 2010 dan 2011. Beberapa negara yang tercatat melakukan pencurian ikan yakni Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam dan Myanmar.

Praktik pencurian ikan dari tahun ke tahun menjadi berkurang yaitu dari tahun 2012-2015. Namun pada tahun 2016 menjadi peningkatan kasus pencurian ikan oleh kapal asing. Dalam hal ini adanya AMF (*ASEAN Maritime Forum*) dapat terus meningkatkan kerjasama diplomasi multilateral antara Indonesia dan negara Asia Tenggara lainnya yang juga memiliki kasus *Illegal Fishing*.

Pemerintah selalu berusaha untuk menangkap kapal-kapal illegal tersebut, dan hal ini membuktikan jika aksi pencurian ikan masih terus terjadi di perairan

Indonesia. Efek jera penenggelaman kapal bagi pencuri ikan belum mampu menghalau kapal pencuri ikan.

Pencurian ikan terus berlangsung karena kekayaan laut yang dimiliki Indonesia ditambah nelayan lokal belum mampu untuk mengelola semuanya sehingga pihak asing masih tergiur mencuri ikan di Indonesia. Grafik dari tahun sebelumnya tidak ada perubahan, pencuri ikan masih terus masuk mencuri ke perairan Indonesia.

Dengan adanya AMF ini, kasus pencurian ikan dapat terdata dan juga diharapkan dapat mengurangi kasus *Illegal Fishing* tersebut ditahun berikutnya, sehingga Indonesia tidak mendapatkan kerugian yang besar, hal tersebut juga dapat mempengaruhi hubungan Indonesia dengan Negara Asia Tenggara memiliki dampak yang buruk.

Untuk memerangi kejahatan perikanan internasional itu, bukan hanya peran pemerintah saja ataupun organisasi internasional, peran aktif seluruh elemen masyarakat untuk sama-sama memantau dan mengawasi aktifitas illegal sangat penting. Bila masyarakat juga ikut berperan aktif maka kasus illegal fishing ini dapat membantu. Diharapkan masyarakat yang melihat segera melapor ke aparat penegak hukum terdekat agar cepat ditindak. Karena bagaimanapun di laut kita sekarang masing banyak aktifitas illegal fishing yang luput dari pengawasan petugas.

AMF merupakan perwujudan dari konsep interdependensi antar Negara khususnya di Negara-negara anggota ASEAN. Hal ini terwujudnya dalam hal interdependensi maritime, dimana tiap-tiap Negara memiliki tugas dan tanggung

jawab untuk menjaga kestabilan keamanan wilayahnya, sehingga lebih efisien bagi negara-negara tersebut untuk menangani kasus *illegal fishing* dan perlu peningkatan kesadaran bahwa setiap Negara memiliki hukum laut, sehingga dalam setiap pelanggaran yang dilakukan oleh kapal nelayan asing yang mencuri ikan tidak dapat ditoleransi oleh pemerintahan Indonesia.